

**PENGUJIAN HUKUM WAGNER
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, PERIODE 1983-1993**

S K R I P S I

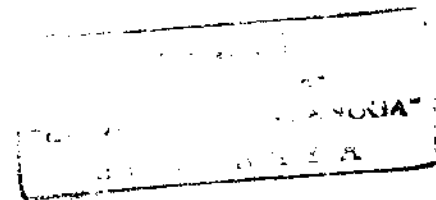
**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN**



KIC
e. 639 / 97

Suk

P



DIAJUKAN OLEH :
NI MADE SUKARTINI
No. Pokok. : 049214108

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

SKRIPSI
PENGUJIAN HUKUM WAGNER
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA, PERIODE 1983 - 1993

DIAJUKAN OLEH
NI MADE SUKARTINI
NO. POKOK : 049214108

TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING



H. SUHERMAN R. S. E., GDip. EcDev., M. Com.

TANGGAL.....

19-5-97

KETUA JURUSAN



Drs. Ec. SOEKARNOTO

TANGGAL.....

30.6-1997

ABSTRAKSI

Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia, peranan pengeluaran pemerintah dalam Produk Domestik Bruto senantiasa meningkat. Pengeluaran pemerintah senantiasa meningkat hampir dalam semua sistem perekonomian, baik sistem sosialis maupun kapitalis. Walaupun dewasa ini hampir sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi yang ekstrim ini.

Ada delapan variabel yang dikemukakan dapat mengakibatkan naiknya pengeluaran pemerintah yaitu, perang, urbanisasi, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat, perkembangan demokrasi, pengangguran, program kesejahteraan sosial, pengeluaran pemerintah sendiri yang menimbulkan inefisiensi, pemborosan dan birokrasi, dan fungsi pemerintah sebagai pelopor dan penggerak pembangunan. Karena tidak semua variabel ini dapat diperoleh informasi yang bersifat ekonomi (angka), misalnya demokrasi, inefisiensi, dan ketidakmampuan penulis untuk mengumpulkan data-data tersebut, maka penulis hanya memilih dua variabel saja, yaitu pendapatan perkapita dan jumlah penganggur. Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pengaruh kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penganggur terhadap kenaikan pengeluaran pemerintah. Penelitian-penelitian terhadap perkembangan pengeluaran pemerintah dalam Produk Domestik Bruto sudah pernah dilakukan di beberapa negara seperti di Amerika, Inggris, dan hasilnya hampir 50 % kenaikan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh faktor tugas pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan semakin meningkatnya kesejahteraan mereka. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti kondisi di Indonesia, apakah hal ini juga berlaku di Indonesia, walaupun dalam kurun waktu hanya 11 tahun penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program komputer microstat.